

**PENERAPAN NILAI INTEGRITAS DALAM REKRUTMEN POLITIK
CALON ANGGOTA DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG DARI
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) 2019**

(Skripsi)

Oleh
M. WIRYAWAN SAPUTRA



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PENERAPAN NILAI INTEGRITAS DALAM REKRUTMEN POLITIK CALON ANGGOTA DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG DARI PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) 2019

Oleh:

M. Wiryawan Saputra

Partai Golkar telah melakukan rekrutmen terhadap calon yang akan maju pada pemilihan Calon Legislatif (Pilcaleg) tahun 2019. Partai Golkar tidak ingin proses rekrutmen menghasilkan kader tidak berintegritas, dikarenakan kurun waktu 10 tahun terakhir penyumbang kasus korupsi terbesar berasal dari anggota DPR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai integritas dalam rekrutmen politik calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Golkar. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melibatkan kader Partai Golkar, akademisi, jurnalis serta calon legislatif dari Partai Golkar. Hasil penelitian ini adalah Partai Golkar tidak menerapkan nilai integritas yang *pertama*, nilai memegang teguh prinsip karena Partai Golkar tidak terbuka dalam proses rekrutmen. *Kedua*, berperilaku terhormat calon yang telah terkena kasus hukum telah melanggar tindak tidak tercela namun tidak adanya keselarasan internal partai dalam hal tersebut. *Ketiga*, jujur, Golkar memiliki tim khusus untuk menjaring dan mencari kebenaran laporan-laporan yang telah dikumpulkan para caleg sehingga para caleg akan terjaring ketat. *Keempat*, memiliki keberanian dalam mahar politik, Golkar menegaskan bahwa tidak adanya mahar politik. Partai Golkar selalu menjunjung tinggi Juklak 10. *Kelima*, tindakan berdasarkan ilmu dalam Partai Golkar menerapkan sikap pragmatis karena partai butuh suara yang banyak. *Keenam*, tidak bertindak dengan hawa nafsu, Partai Golkar melakukan beberapa tindakan seperti melakukan pembinaan terhadap kadernya, melakukan pemantauan sikap kader di masyarakat. Proses rekrutmen politik pada Partai Golkar tidak menerapkan nilai integritas. Partai Golkar masih bersifat pragmatis dalam proses rekrutmennya yang dapat menimbulkan kekecewaan pada kader internal partai serta lahirnya kutu loncat dalam Partai Golkar.

Kata kunci: Nilai Integritas, Rekrutmen Politik, Partai Politik.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF INTEGRITY VALUES IN THE POLITICAL RECRUITMENT OF CANDIDATES OF BANDAR LAMPUNG CITY MEMBERS FROM PARTNERS OF GOLONGAN KARYA (GOLKAR) 2019

By:

M. Wiryawan Saputra

The Golkar Party has recruited candidates who will advance in the 2019 Legislative (Pilcaleg) election. The Golkar Party does not want the recruitment process to produce cadres with no integrity, because the past 10 years contributed to corruption cases from DPR members. The purpose of this study was to inform how the authority in political recruitment of candidates for members of the Bandar Lampung City DPRD from the Golkar Party. This type of research is descriptive with the approach of Golkar Party cadres, academics, journalists and legislative candidates from the Golkar Party. The result of this study is that the Golkar Party does not implement the first integrity values, the values of the principle are firm because the Golkar Party is not open in the recruitment process. Second, behaving in other words responsible for cases is not covered and there are no internal consequences of the party in that matter. Third, honestly, Golkar has a special team to capture and find the truth of the reports collected by the legislative candidates and the candidates will be tightly netted. Fourth, having the courage in political dowry, Golkar determined that there was no political dowry. The Golkar Party always upholds the Juklak 10. Fifth, the actions in the Golkar Party apply a pragmatic attitude because the party needs a lot of votes. Sixth, not acting with lust, the Golkar Party carried out a number of actions such as conducting guidance to its cadres, carrying out cadre duties in the community. The process of political recruitment for the Golkar Party is not carried out with integrity values. The Golkar Party is still pragmatic in its recruitment process which can lead to disappointment in the party's internal cadres and the birth of fleas in the Golkar Party.

Keywords: Integrity Value, Political Recruitment, Political Parties.

**PENERAPAN NILAI INTEGRITAS DALAM REKRUTMEN POLITIK CALON
ANGGOTA DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG DARI PARTAI GOLONGAN KARYA
(GOLKAR) 2019**

Oleh

M. WIRYAWAN SAPUTRA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PENERAPAN NILAI INTEGRITAS DALAM REKRUTMEN POLITIK CALON ANGGOTA DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG DARI PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) 2019**

Nama Mahasiswa : **M. Wiryawan Saputra**

No. Pokok Mahasiswa : **1416021060**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
NIP 19680112 199802 1 001

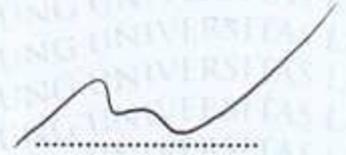
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

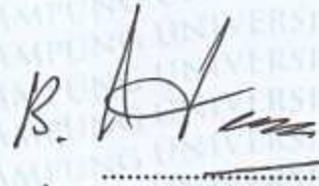
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

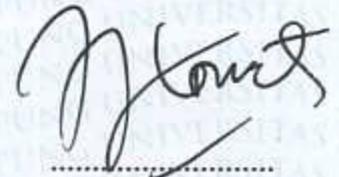
Ketua • : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



Sekretaris : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



Penguji : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **26 September 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 8 Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan,



M. Wiryawan Saputra
NPM. 1416021060

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap M. Wiryawan Saputra, dilahirkan di Tanjung Karang Barat pada tanggal 24 September 1996, Peneliti merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara, putra pasangan Bapak Leaderwan dan Ibu Eni Marita. Jenjang pendidikan Peneliti dimulai dari SD IT Permata Bunda Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP IT Ar-Raihan Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya, Peneliti mengenyam pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2014.

Pendidikan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur undangan SNMPTN pada tahun 2014, dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Pada tahun 2017 di bulan Januari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari.

Motto

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri

(QS. Al-Isra': 7)

*Tanah yang digadaikan bisa kembali dalam keadaan lebih berharga,
tetapi kejujuran yang pernah digadaikan tidak pernah bisa ditebus kembali.*

(M. Wiryawan Saputra)

Persembahan

Ku Persembahkan Karya ini

Kepada

Kedua orang tuaku terceinta atas segala pengorbanan disertai do'a yang tulus dan tiada henti untuk segala urusanku dan keberhasilanku. Terimakasih yang tak terhingga untuk segala cinta dan kasih sayangnya yang telah diberikan kepadaku.

Kakak-kakakku yang selalu meberikan do'a, semangat serta dukungannya yang tiada henti selama ini.

Seluruh keluarga besarku, sahabat dan teman-teman yang selalu mendukungku.

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul “Penerapan Nilai Integritas dalam Rekrutmen Politik Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Golongan Karya (Golkar) 2019” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Leaderwan dan Eni Marita atas segala doa, cinta dan kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang terus mengalir dan tak mampu penulis balas segala jasa dan kebaikannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan kasih sayang-Nya serta balasan atas segala jasa dan kebaikan Ayahanda dan Ibunda.

2. Abang-abang kandung penulis, dr. Gustav Hadinata dan dr. Nopan Rahmat Dermawan. Terima kasih atas segala doa dan semangat serta cinta dan kasih sayang yang diberikan, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kekuatan dan kemudahan dalam segala urusan sehingga kita mampu menjadi anak yang membanggakan orang tua kita.
3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku pembimbing utama penulis. Terima kasih ilmu, saran, semangat dan motivasi guna terciptanya skripsi ini, terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis yang ibu berikan. Semoga kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk ibu baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
4. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP. selaku pembimbing kedua. Terima kasih atas kesabaran untuk meluangkan waktu dalam menghadapi penulis, atas segala bimbingan ilmu, saran yang sangat bermanfaat serta motivasi dan semangat untuk menghasilkan skripsi yang baik dan benar sehingga atas kebaikan bapak, penulis mampu menyelesaikan skripsi dan studi tepat pada waktunya. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
5. Bapak Drs. Hertanto, M. Si., Ph.D. selaku dosen pembahas. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang membangun demi terciptanya progres yang signifikan terhadap skripsi penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

6. Seluruh dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila. Terima kasih atas kebaikan dan ilmu yang diberikan sehingga mampu menjadi jendela wawasan bagi penulis di masa kini dan di masa yang akan datang. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk kita semua di dunia ataupun di akhirat kelak.
7. Sekelompok teman-teman. Dhian Kurniawan, Shinta Silvia Novianna, Nosi Marisa, S.IP., Iranda Putri, S.IP., M. Dhian Bagus Aprian, Muchammad Dhean Pratama, Kgs Faishal, Redhi Nopriandi Gustam dan Aziza Novirania. Terima kasih atas segala kenangan, waktu kebersamaan.
8. Sekelompok calon menteri yang tergabung di dalam Kabinet Bukan. Gita Pratiwi Effendi S.IP, Dita Maharani, S.IP., Nurul Fatia, Nosi Marisa, S.IP., Shinta Silvia Novianna S.IP dan Dhian Kurniawan S.IP. Terima kasih atas segala kenangan, waktu kebersamaan, keceriaan, kesedihan, kekompakan serius belajar bersama dan selalu memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memudahkan urusan kita semua.
9. Sekelompok paguyuban Bismillah, S.IP. yang sering pecah belah menjelang Pilkada dan Pemilu, hehe. Dhian Kurniawan, Komang Evan Riana, Bayu Yustisianto Eka Paksi, Yoga Pratama, Aldin Muharom dan Muhammad Iqbal. Terima kasih atas segala kenangan dan kebersamaan kita, keceriaan dan kekompakan serius belajar bersama dan jangan lupakan Pakde Soppingiro, yang telah mengisi perut kita hampir selama 4 tahun terakhir. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dimanapun kalian berada. *See you on top guys.*

10. Teman-teman Ilmu Pemerintahan, Nyunyun S.IP, Mike, S.IP., Debby S.IP, Asfhira, S.IP., Elvina S.IP, Mega S.IP, Ana S.IP, SyahriniDhian S.IP, Bella S.IP, Mirani S.IP, Sita S.IP, Priska S.IP, Anul S.IP, Depoy S.IP, Miss, S.IP., Umayra, S.IP., Silvi S.IP, Icha S.IP, SintaPP S.IP, Nia, SintaKetum S.IP, Elyta S.IP, Ulfa Umayra, S.IP., Alvilia S.IP, Intan S.IP, AbuBrewok S.IP, BrillCina S.IP, RedhiSyik S.IP, Madon S.IP, Theo S.IP, Gery S.IP, Yusuf, S.IP., Ikhsan S.IP, Akbar S.IP, Ndo S.IP, Fadhil S.IP, Ujang, S.IP., Billy S.IP, Andri S.IP, Shohib S.IP, Double Wahyu S.IP, Yudi S.IP, Sandi S.IP, BungRidho S.IP, Aldi S.IP, Ezio S.IP, Indra S.IP, Fedry S.IP, Ferdian S.IP, Eliyas S.IP, Syahrul S.IP, Adlul S.IP, Nurcahyo S.IP, Gustiansyah S.IP, Adit S.IP, Bang Tri Arista, S.IP. dan teman-teman lain mohon maaf tidak bisa tulis semua. Semoga kita semua menjadi sarjana dengan predikat memuaskan, terima kasih atas segala kenangan selama 4 tahun kebersamaan.
11. Teman-teman KKN Sidodadi: Alan Suseno, S.T., Nur Cahyati, S.H., Ahmad Shan, S.P., Elma Rosa Vidia, S.Ked., Sarah Mega, S.E., Meliana Alisa, S.P. Terima kasih sudah membuat 40 hariku penuh dengan bahagia.
12. Temanku dan sahabatku yang selalu *support* dibalik layar Annisa Citra Mutiara semoga semua do'a nya terkabulkan aamiin. *See you on...*

Bandar Lampung, 5 September 2018

M. Wiryawan Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
II. TINJAUAN TEORITIK	
A. Konsep Integritas	13
1. Pengertian Integritas	12
2. Elemen-elemen Integritas	13
3. Indikator Integritas.....	14
B. Partai Politik.....	15
1. Pengertian Partai Politik	15
2. Tujuan dan Fungsi Partai Politik.....	17
C. Rekrutmen Politik	19
1. Pengertian Rekrutmen Politik	19
2. Proses Rekrutmen Politik.....	21
3. Mekanisme Rekrutmen Pada Partai Golkar	23
D. Penerapan Nilai Integritas dalam Rekrutmen Politik.....	24
E. Kerangka Pikir Penelitian	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	30
B. Fokus Penelitian	31
C. Informan.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Pengolahan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38
H. Teknik Validasi Data	40

IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Partai Golkar	41
B. Visi Partai Golkar	46
C. Misi Partai Golkar	47
D. Tujuan dan Fungsi Partai Golkar	48
E. Keanggotaan dan Sistem Kaderisasi Partai.....	49
F. Struktur Organisasi, Wewenang dan Kewajiban	50
G. Ukuran Rekrutmen Yang Berintegritas	52
1. Menurut Partai Golkar	52
2. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi	53
3. Menurut Teori Hendarjatna dan Budi Rahardja.....	53

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Nilai Integritas dalam Rekrutmen Politik Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Golkar.....	54
1. Memegang Teguh Prinsip	55
2. Berperilaku Terhormat	72
3. Jujur.....	80
4. Memiliki Keberanian.....	95
5. Melakukan Tindakan Berdasarkan Ilmu/Tidak Ceroboh	103
6. Tidak Bertindak dengan Hawa Nafsu	108
B. Bagaimana Rekrutmen Yang Tidak Berintegritas Menghasilkan Kader Yang Berintegritas	
1. Masalah Rekrutmen Yang Tidak Berintegritas Menghasilkan Kader Yang Berintegritas	120
2. Keburukan Jika Rekrutmen Tidak Mengutamakan Nilai Integritas Dalam Rekrutmen	122

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	125
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Daftar Data Anggota DPR RI Yang Terseret Kasus Korupsi 10 Tahun Terakhir.....	4
2. Daftar Data Anggota DPR Lampung Yang Terseret Kasus Hukum 10 Tahun Terakhir Fraksi Partai Golkar	6
3. Anggota DPRD Lampung terpilih 2014-2019 Fraksi Partai Golkar.....	7
4. Informan.....	33
5. Hasil Penomoran Urut Dapil 5 Kota Bandar Lampung 2014-2019.....	60
6. Hasil Penomoran Urut Dapil 5 Kota Bandar Lampung 2014-2019.....	60
7. Kepengurusan Partai Golkar DPD II Kota Bandar Lampung.....	64
8. Triangulasi Memegang Teguh Prinsip.....	71
9. Daftar Data DPD I GOLKAR Lampung Yang Terseret Kasus Hukum	78
10. Triangulasi Berperilaku Terhormat.....	79
11. Daftar Calon Tetap Partai Golkar DPD II Tahun 2014-2019	87
12. Daftar Calon Sementara DPD II Partai Golkar Dapil 1	89
13. Daftar Calon Sementara DPD II Partai Golkar Dapil 2	90
14. Daftar Calon Sementara DPD II Partai Golkar Dapil 3	91
15. Triangulasi Kejujuran.....	94
16. Triangulasi Keberanian	102
17. Triangulasi Melakukan Tindakan Berdasarkan Ilmu.....	108
18. Triangulasi Tidak Bertindak Dengan Hawa Nafsu	112
19. Daftar Calon Sementara DPD II Partai Golkar Dapil 1	114
20. Daftar Calon Sementara DPD II Partai Golkar Dapil 2	115
21. Daftar Calon Sementara DPD II Partai Golkar Dapil 3	117

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara, karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsi rekrutmen politik.

Rekrutmen merupakan sarana dari partai politik untuk mendapatkan kader yang berpotensi serta memiliki integritas untuk ditempatkan dalam jabatan publik. Sebagaimana dijelaskan Budiardjo (2004: 164) partai politik sebagai sarana rekrutmen politik juga berfungsi mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik haruslah melalui mekanisme yang telah ditentukan dengan memperhatikan integritas calon pengisi jabatan politik agar dapat menghasilkan kader yang berkualitas serta mendapatkan citra untuk partai politik.

Partai politik hadir di tengah masyarakat memiliki tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program yang disusun berdasarkan ideologi dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Tujuan memperoleh eksistensi dalam sistem politik, merupakan salah satu target partai politik yang dalam hal ini partai politik harus bersaing dalam pemilihan umum dan memperoleh suara dari masyarakat dan mendapat kursi di parlemen. Salah satu cara yang dilakukan oleh partai politik adalah dengan rekrutmen politik. Proses rekrutmen politik tentunya berkaitan dengan integritas partai politik yang nantinya akan menunjukkan berhasil/tidaknya sebuah partai politik melakukan rekrutmen.

Banyak pertimbangan bagi partai politik untuk memilih kader terbaik dalam proses rekrutmen. Partai Golkar memiliki kriteria rekrutmen politik calon legislatif yang harus dimiliki oleh calon legislatifnya berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP-227/DPP/Golkar/I/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar, adapun kriteria tersebut adalah:

- a) Memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota legislatif.
- b) Memiliki pengabdian dan rekam jejak yang baik selama aktif di Partai Golkar.
- c) Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT).
- d) Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.

Dari kriteria tersebut Partai Golkar menginginkan kader yang memiliki prestasi, disiplin, dedikasi, pengabdian dan rekam jejak yang baik. Dari pernyataan tersebut merupakan salah satu dari nilai integritas yang harus dimiliki. Integritas para kader politik sangat ditentukan oleh proses rekrutmen

para kader. Ketika berbicara mengenai integritas, maka tidak akan terlepas dari upaya untuk menjadi orang yang utuh dan terpadu di setiap bagian diri yang berlainan, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya.

Integritas sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan manusia. Sejalan dengan pemikiran Henry Cloud (2007:17) orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.

UU No 2 Tahun 2011 Pasal 29 tentang partai politik menyebutkan :

Maka partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk menjadi anggota partai politik; bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden melalui serangkaian tahapan tertentu.

Proses rekrutmen politik khususnya Partai Golkar pada saat ini cenderung menyimpang sebagaimana yang dikatakan Agun Gunanjar, dia mengatakan:

“Kentalnya sistem oligarki pada Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie yang lebih mementingkan kepentingan segelintir elitnya dan sikap pragmatis. Sikap pragmatis partai hanya akan melahirkan kekecewaan dan bermunculannya kader serta politisi yang hanya mementingkan segelintir kelompoknya. Proses rekrutmen yang baik akan menghasilkan kader yang baik pula, namun jika proses rekrutmen tidak berjalan dengan semestinya . tidak heran apabila akhirnya sebuah partai politik diisi oleh kader-kader yang tidak berkualitas dan berintegritas dan cenderung korupsi.” Tuturnya. (sumber: nasionalkompas.com diakses pada 8 Maret 2018 pukul 20.46 WIB)

Seperti yang di jelaskan Tabel 1 Daftar Data Anggota DPR RI yang terseret kasus korupsi 10 tahun terakhir.

Tabel 1. Daftar Data Anggota DPR RI Yang Terseret Kasus Korupsi 10 Tahun Terakhir

No	Nama partai	Periode 2004-2009	Periode 2009-2014
1.	PDIP	-	17 orang
2.	Partai Golkar	15 orang	4 orang
3.	Partai Demokrat	1 orang	3 orang
4.	Partai PAN	2 orang	1 orang
5.	PPP	3 orang	-
6.	PKB	1 orang	-
7.	PBR	1 orang	-
8.	PKS	-	1 orang

Sumber : kpk.go.id dan medeka.com diakses pada 21 Desember 2017 pukul 19.00

Berdasarkan daftar data anggota DPR RI yang terseret kasus korupsi 10 tahun terakhir terlihat bahwa masih banyak anggota DPR RI yang terseret kasus korupsi 10 tahun terakhir. Pada periode 2004-2009 paling banyak berasal dari Partai Golkar, sedangkan pada periode 2009-2014 paling banyak berasal dari PDIP. Terlihat bahwa memang Partai Golkar menyumbangkan kader nya paling banyak walaupun presentasi jumlah nya menurun dari periode 2004-2019 tapi jika di akumulasikan jumlah kader yang terseret korupsi paling banyak ialah kader dari Partai Golkar.

Fenomena merosotnya citra partai politik bagi rakyat, muncul juga di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Hasil “jajak pendapat” Kompas yang dirilis tanggal 11 Maret 2011 menunjukkan citra yang tidak indah terhadap partai politik di Indonesia. Dari 1.127 responden yang berusia 17 tahun ke atas yang berdomisili di 57 kota di seluruh Indonesia, terdapat 87% responden berpendapat bahwa partai politik belum berhasil memunculkan calon-calon pemimpin yang berkualitas.

Demikian juga terdapat 82,1% responden yang menilai bahwa partai politik tidak berpihak kepada kepentingan rakyat dan hanya 31% responden yang menyatakan bahwa partai politik mampu membawa nama bangsa menjadi disegani di forum internasional. Terdapat juga 71,9% responden yang menyatakan bahwa partai politik tidak mampu melindungi hak asasi manusia, kelompok minoritas dan etnis. Selain itu, terdapat 74,9% responden menilai bahwa partai politik tidak berkomitmen memberantas korupsi dan melaksanakan penegakan hukum sebagaimana mestinya (sumber : www.kompasiana.com diakses pada 29 November 2017 pukul 20.15 WIB)

Apabila rekrutmen partai politik dijalankan dengan baik, maka partai politik akan memperoleh citra yang bagus dari publik. Hasil jajak pendapat Kompas diperkuat oleh pandangan sejumlah pakar yang menyebut bahwa partai politik yang tidak memiliki sumber keuangan yang handal dicirikan sebagai “pemburu rente”. Hal ini sejalan dengan hasil studi doktor Kuskridho Ambari (Arifin, 2014:200) yang mengungkap tentang politik kartel pada era reformasi di Indonesia yang diperankan oleh partai politik.

Korupsi yang telah terjadi sejak Orde Baru seolah telah mengakar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan *Transparency Internasional Rangking* 2011, Indonesia masuk peringkat 100 indeks persepsi korupsi (IPK) dari 183 negara di seluruh dunia (Asrudin dalam Kompas 2012; Arifin, 2014:222). Penilaian berbagai lembaga internasional itu niscaya politikus terkait di dalamnya dan bahkan merupakan penyebabnya.

Serperti yang dijelaskan pada tabel 2 mengenai daftar data anggota DPRD Lampung yang terseret kasus hukum 10 tahun terakhir.

Tabel 2. Daftar Data Anggota DPRD Lampung Yang Terseret Kasus Hukum 10 Tahun Terakhir dari Fraksi Partai Golkar

No	Nama Anggota Yang Terjerat Kasus Hukum	Kasus	Keterangan
1.	Heri Ermawan	Suap terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016.	Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Periode 2014-2019
2.	Gusti Rahmat kartolo	Rp.3,7 M (Mengelembungkan Anggaran Dana Asuransi Kesehatan dan Dana Perumahan anggota DPRD Bandar Lampung Tahun Anggaran 2001 dan 2002)	Anggota DPRD Bandar Lampung Periode 1999-2004
3.	Miswan Rodi	Penganiayaan dengan kekerasan	Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2014-2019
4.	Azwar Yakub	Penganiayaan dengan kekerasan	Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2014-2019
5.	Firmansyah	Narkoba	Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2009-2014

Sumber: Diolah oleh peneliti 2018

Berdasarkan Daftar Data Anggota DPRD Lampung Yang Terseret Kasus Hukum 10 Tahun Terakhir dari Fraksi Partai Golkar. Partai Golkar tercatat telah menyumbangkan 5 kadernya dalam kasus hukum pada kurun waktu 10 tahun terakhir yang dimana akan menimbulkan pertanyaan bahwa bagaimana yang seharusnya sebagai wakil rakyat bisa terseret kasus hukum.

Saat ini, menjelang pemilihan umum legislatif pada 2019 mendatang berbagai partai politik mulai melakukan rekrutmen untuk menjaring kader-kader yang akan maju pada pemilu legislatif 2019. Partai politik berlomba-lomba untuk memperebutkan kursi agar dapat mengusungkan calon presiden dari partainya. Berbagai strategi diluncurkan untuk menarik minat masyarakat agar bergabung bersama sebuah partai politik. Hasil pemilu legislatif pada 2014 lalu menjadi bahan pertimbangan sebuah partai politik dalam menentukan strategi politik untuk memenangkan kembali calon anggota legislatif dari partainya.

Salah satu partai politik yang ikut serta dalam pemilu legislatif pada 2014 lalu ialah Partai Golkar yang berhasil mendudukkan 91 orang kadernya pada kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk Provinsi Lampung, Partai Golkar mampu mendudukkan 10 orang kadernya pada kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut ini data kader Partai Golkar yang lolos menjadi anggota legislatif pada pemilu legislatif 2014 lalu:

Tabel 3. Daftar Anggota DPRD Lampung terpilih 2014-2019 Fraksi Partai Golkar

No	Nama	Dapil
1	Azwar Yacub	1
2	Tony Eka Candra	2
3	Ririn Kuswantari	3
4	FX. Siman	3
5	Mirzalie	4
6	Thaib Husin	5
7	Ismet Roni	6
8	Miswan Rody	7
9	I Nyoman Suryana	7
10	Mega Putri Tarmizi	8

Sumber: diolah oleh peneliti 2017

Berdasarkan daftar anggota DPRD Lampung yang terpilih 2014-2019 fraksi Partai Golkar, kader Partai Golkar Lampung berhasil memperoleh suara cukup banyak pada beberapa daerah pilih. Menjelang pemilu legislatif pada 2019, Partai Golkar kembali melakukan rekrutmen untuk menjaring kader-kader baru yang akan didudukannya sebagai anggota legislatif baik ditingkat lokal maupun nasional. Jika dilihat dari sejarahnya, maka Partai Golkar merupakan partai politik yang sudah sering ikut serta dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif. Namun pencapaian yang diraih partai ini cukup tinggi dalam pemilu legislatif walaupun banyak fakta yang menunjukkan banyak kader nya yang terseret kasus hukum.

Pada akhirnya, berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas maka peneliti merasa ingin tahu bagaimana penerapan nilai integritas dalam rekrutmen politik yang diterapkan Partai Golkar DPD II Kota Bandar Lampung untuk menjaring bakal calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang akan maju pada pemilu legislatif 2019 mendatang.

Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang mengkaji mengenai rekrutmen politik. Sebelumnya, penelitian mengenai rekrutmen politik sudah banyak dilakukan. Berikut ada beberapa penelitian terdahulu: Roni Tamara Saputra (2009) Penelitian ini Menganalisis proses system kaderisasi, proses penetapan calon anggota legislatif, pertimbangan partai Golkar dalam menetapkan calon anggota legislatif dari orang yang bukan dari kader Partai Golkar.

Antonius Atosökhi Gea (2014) Penelitian ini menganalisis Integritas bagi kepemimpinan, yang membuatnya bisa melaksanakan dan menghasilkan kinerja kepemimpinan etis. Teguh Adi (2014) dari Partai Golkar Untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019. Penelitian ini menganalisis pola rekrutmen partai Golkar untuk DPRD Jateng periode 2014-2019. Parji (2014) Penelitian ini menganalisis pengaruh eksternal maupun internal, dan nilai-nilai tersebut cenderung mengalami erosi dan degradasi.

Dalam konteks seperti ini, dunia pendidikan, termasuk para pendidik memiliki peran strategis dalam mempertahankan sekaligus mengembangkan nilai-nilai integritas dan identitas nasional, karena pendidikan memiliki fungsi enkulturasi dan sosialisasi nilai kepada peserta didik agar mampu membangun dirinya dan bersama-sama dengan lingkungannya membangun masyarakat dan bangsa.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang di uraikan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian tersebut. Berdasarkan beberapa judul penelitian mengacu kepada permasalahan rekrutmen kader dan integritas. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang mengambil tema tentang integritas dalam rekrutmen politik. Ruang lingkup pada permasalahan penelitian ini pada penerapan nilai integritas dalam rekrutmen legislatif pada tahun 2019 sedangkan pada dua penelitian milik Teguh Adi Prasajo dan Ron Tamara Saputra ruang lingkup nya pada pola dan proses rekrutmen.

Berdasarkan metode, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pemilihan metode penelitian yang di pakai oleh peneliti sama dengan ketiga penelitian diatas. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti tertarik meneliti lebih jelas lagi bagaimana penerapan nilai integritas dalam rekrutmen, khususnya rekrutmen politik Partai Golkar. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan membahas bagaimana penerapan rekrutmen politik yang diterapkan Partai Golkar Lampung untuk menjaring bakal calon anggota legislatif yang akan maju pada Pemilu Legislatif 2019 mendatang. Selanjutnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Penerapan Nilai Integritas dalam Rekrutmen Politik Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Golkar 2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana penerapan nilai integritas dalam rekrutmen politik calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Golkar 2019?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan nilai integritas dalam rekrutmen politik calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Golkar 2019.
2. Untuk mengetahui norma-norma integritas Partai Golkar.
3. Melihat proses seleksi untuk mendapatkan calon legislatif yang berintegritas.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan Ilmu Pemerintahan khususnya mengenai penerapan nilai integritas dalam rekrutmen anggota partai.
2. Secara praktis penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna bagi DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung dalam penerapan nilai integritas dalam rekrutmen anggota partai.

II. TINJAUAN TEORITIK

A. Konsep Integritas

1. Pengertian Integritas

Integritas merupakan standar moralitas yang tertanam pada individu seseorang sehingga penilaian baik atau tidak integritas individu terlihat dari moral dan etika yang dimiliki individu sendiri. Paine (1994) mengatakan integritas merupakan sebuah standar moralitas dan etika seseorang. Konsep integritas itu sendiri di dalamnya mengidentikkan dengan kata hati, akuntabilitas moral, komitmen moral, dan konsistensi moral seseorang. Integritas sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan manusia.

Integritas juga memiliki nilai kemanusiaan seperti yang dikatan Agus Suryo Sulaiman (2010:131) bahwa integritas adalah keseluruhan nilai-nilai kejujuran, keseimbangan, memberi kembali, dedikasi, kredibilitas dan berbagai hal pengabdian diri pada nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup. Meninjau dari pendapat tersebut integritas yang di maksud adalah berusaha memberikan yang terbaik dan menebarkan nilai positif dalam kehidupan. Sumartono (2004:16) menambahkan bahwa integritas adalah adalah bersikap jujur, konsisten, komitmen, berani, dan dapat dipercaya.

Sedangkan menurut Wurangian (2005:395) Integritas yaitu sebagai suatu elemen karakter yang mendasari pengakuan profesional. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa sehingga laporan yang disajikan ini dapat menjelaskan suatu kebenaran akan fakta, karena dengan cara itulah maka masyarakat dapat mengakui profesionalisme seseorang.

Integritas sendiri merupakan sebuah hasil usaha seseorang yang berhasil sebagaimana menurut Mulyadi (2007:145) integritas adalah kemampuan orang untuk mewujudkan apa yang telah diucapkan atau dijanjikan oleh orang tersebut menjadi suatu kenyataan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa integritas merupakan sikap dan perbuatan seseorang yang dilandasi oleh nilai-nilai untuk jujur, konsisten, komitmen, berani, profesionalisme seseorang dan dapat dipercaya sesuai dengan kenyataan yang ada.

2. Elemen-elemen Integritas

Hendarjatno dan Budi Rahardja (2003:118) elemen-elemen integritas adalah:

- a. Harus memegang teguh prinsip
- b. Berperilaku terhormat
- c. Jujur
- d. Memiliki keberanian
- e. Melakukan tindakan berdasarkan pada keyakinan akan keilmuannya yang tidak ceroboh
- f. Tidak bertindak dengan menuruti hawa nafsu

Uraian penjelasan sebagai berikut:

- a. Harus memegang teguh prinsip yaitu pedoman bertindak untuk memperoleh hasil maksimal dengan pengorbanan tertentu.
- b. Berperilaku terhormat yaitu dengan menghindarkan diri dari segala kecurangan dan praktik-praktik yang melanggar peraturan dan kode etik yang berlaku.
- c. Jujur yaitu apa yang dikatakan seseorang yang berintegritas harus sesuai dengan hati nuraninya dan apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada.
- d. Memiliki keberanian yaitu seseorang harus memiliki keberanian untuk melakukan pengungkapan dan mengambil tindakan yang diperlukan.
- e. Melakukan tindakan berdasarkan pada keyakinan akan keilmuannya yang tidak ceroboh.
- f. Tidak bertindak dengan menuruti hawa nafsu atau membenarkan filosofi tanpa memperhatikan prinsip dan peraturan yang berlaku.

3. Indikator Integritas

Menurut Sukrisno (2004) indikator perilaku integritas adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik.
 - a) Mengikuti kode etik profesi.
 - b) Jujur dalam menggunakan dan mengelola sumber daya di dalam lingkup atau otoritasnya.
 - c) Meluangkan waktu untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan itu tidak melanggar kode etik.
2. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai (*value*) dan keyakinannya.
 - a) Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinan.
 - b) Berbicara tentang ketidaketisan meskipun hal itu akan menyakiti kolega atau teman dekat.
3. Bertindak berdasarkan nilai (*value*) meskipun sulit untuk melakukan itu.
 - a) Secara terbuka mengakui telah melakukan kesalahan.
 - b) Berterus terang walaupun dapat merusak hubungan baik.

B. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, partai politik merupakan bagian instrumen bagi masyarakat yang penting. Partai politik dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkompetisi dan mengendalikan sistem politik suatu negara tersebut melalui penguasaan jabatan politik yang ada. Penguasaan jabatan politik tersebut diraih melalui mekanisme pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik. Selain hal tersebut melalui partai politik ditujukan agar mampu mengartikulasikan kepentingan aspirasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik.

Banyak dari para ahli yang mendefinisikan tentang partai politik. Seperti Budiarto (2008: 160) partai politik (parpol) adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, dimana tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka. Dengan demikian, setiap kelompok yang memenuhi kriteria tersebut dapat diartikan sebagai partai politik.

Partai politik juga merupakan sebuah organisasi yang tersusun sebagaimana menurut Rusadi Kantaprawira (2004: 63) partai politik, yaitu organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*ideal objective*), mempunyai program politik (*political platform, material objective*) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa.

Eep Saefulloh Fatah dalam Hamid (2008: 9) menguraikan pengertian partai politik adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan kumpulan individu;
- 2) Merupakan perkumpulan yang terorganisir dengan definisi mengenai posisi, fungsi, dan hirarki anggota yang jelas dan baku;
- 3) Ada ikatan identitas yang sama di antara anggotanya, baik berupa ideologi maupun kepentingan;
- 4) Memiliki tujuan memperoleh kekuasaan politik dalam pemerintahan; dan ikut serta dalam pemilihan umum untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti berpendapat partai politik adalah suatu organisasi yang terorganisir dan mempunyai cita-cita, ideologi, pandangan serta tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh kekuasaan dengan cara mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan agar dapat memegang kontrol terhadap pemerintahan.

Perkembangan partai politik di Indonesia sangat pesat, muncul partai-partai baru seiring dengan perkembangan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam konstitusi, terlebih lagi menjelang diadakannya pesta demokrasi yaitu pemilu, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan seleksi terhadap partai politik yang layak dan memenuhi syarat menjadi peserta pemilu, guna efisiensi partai politik itu sendiri. Partai politik di Indonesia memiliki corak, karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda, perbedaan tersebut tergantung dari jenis partai dan ideologi partainya. Keanekaragaman partai politik yang ada di negara Indonesia ini juga menjadi bukti atas penerapan dari negara demokrasi.

2. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Tujuan dari partai politik di Indonesia tercantum dalam undang-undang. Pengaturan tujuan ini adalah supaya partai politik di Indonesia yang berjumlah sangat banyak itu bisa berdiri dan bergerak ke arah yang sama yaitu mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur walaupun dibungkus dengan ideologi dan *flatform* yang berbeda.

Sedangkan fungsi partai politik berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh partai politik, dan dampaknya terhadap sistem politik. Setiap aktivitas partai politik, terutama partai mayoritas, akan mengalami

dampak terhadap struktur dan fungsi pemerintahan secara proses politik di dalamnya. Sehingga wajar apabila sarjana-sarjana ilmu politik menaruh perhatian cukup besar terhadap partai politik, terutama di negara-negara demokratis, dan negara yang sedang mengalami masa transisi demokrasi.

Banyak ahli yang memberikan pendapatnya perihal fungsi partai politik. Seperti Budiardjo (2013:405) ada 4 fungsi partai politik di negara demokrasi, yaitu sebagai berikut.

- 1) Sebagai sarana komunikasi politik
Partai politik mengadakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*) yang berupa pendapat dan aspirasi, kemudian diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur atau dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Jika tidak ada agregasi dan artikulasi, maka pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan. Oleh karena itu dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dikurangi. Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usulan kebijakan yang dimasukkan dalam program atau *platform* partai (*goal formulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*).
- 2) Sebagai sarana sosialisasi atau pendidikan politik
Sosialisasi politik adalah suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Merupakan bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.
- 3) Sebagai sarana rekrutmen politik
Fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri

dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

4) Sebagai sarana pengatur konflik

Konflik akan selalu ada dalam setiap masyarakat, terutama pada masyarakat yang sifatnya heterogen. Apakah dari segi etnis, sosial dan ekonomi, maupun agama. Setiap perbedaan menyimpan potensi konflik. Disini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasi konflik, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan semaksimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.

Sedangkan menurut Sigmund Neuman (Hamid, 2008: 12), partai politik dalam suatu negara demokrasi mempunyai empat fungsi, yaitu: Pertama, partai mengatur kehendak umum yang kacau; kedua, mendidik warga negara untuk bertanggung jawab secara politik; ketiga, menjadi penghubung antara pemerintah dan pendapat umum; dan keempat, memilih para pemimpin.

C. Rekrutmen Politik

1. Pengertian Rekrutmen Politik

Sedangkan rekrutmen berarti proses mencari atau mendapatkan anggota baru yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang bersifat politik ataupun non politik. Rekrutmen politik berlangsung dalam suatu tatanan yang jelas membutuhkan keberlangsungan secara terus menerus dalam suatu lembaga. Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan, dan kemudian diadopsi oleh partai politik seiring dengan kebutuhan partai akan dukungan kekuasaan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan partai tersebut. Rekrutmen sendiri memiliki

acuan waktu dalam prosesnya, seperti dalam momentum pemilu ataupun regenerasi kepengurusan partai politik.

Rekrutmen merupakan sebuah seleksi untuk pengisian peran dalam politik. Surbakti (2010: 118) mengatakan rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Sedangkan Haryanto, (1982: 45) Definisi rekrutmen politik pada hakekatnya dapat diartikan sebagai penseleksian individu-individu yang berbakat untuk dapat menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan.

Sedangkan Budiardjo mengatakan (2008: 164) rekrutmen politik dalam partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Terdapat perbedaan dengan Budiardjo, Samsudin (2006:81) rekrutmen bukan hanya dalam kegiatan politik namun untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi mengenai pengertian rekrutmen yang telah diuraikan di atas, maka peneliti berpendapat bahwa rekrutmen politik merupakan upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mendapatkan seseorang yang dibutuhkan sebagai calon pengisi kekosongan pada jabatan-jabatan tertentu dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

Rekrutmen politik juga diharapkan mampu menciptakan suatu sistem politik yang dapat memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut, aktor-aktor yang berkecimpung di dalam tersebut harus memiliki kualitas yang mumpuni serta melalui proses seleksi yang didasarkan pada latar belakang yang jelas. Tujuannya adalah agar rekrutmen yang dihasilkan untuk mengisi jabatan politik mampu menjadi pelayan dan pelindung masyarakat. Artinya artikulasi kepentingan masyarakat dapat diperjuangkan.

2. Proses Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui suprastruktur dan infrastruktur politik. Setiap sistem politik menganut pola rekrutmen yang berbeda-beda. Anggota yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menempati

jabatan politik di pemerintahan. Berbicara hal tersebut partai politik juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda-beda antara satu partai dengan partai lainnya. Pola perekrutan politik disesuaikan dengan AD/ART dan kebijakan partai masing-masing.

Di era reformasi, rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya. Guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan secara tertutup.

Berikut proses rekrutmen politik dibagi menjadi dua pola (Syamsudin dalam Tangkilisan, 2003: 189) yaitu:

- a. Rekrutmen terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan baik jabatan politik maupun administrasi atau pemerintahan.
- b. Rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga negara, artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun pemerintah. Dalam sistem yang tertutup ini orang yang mendapatkan posisi elite melalui cara-cara yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga dan lain-lain.

Derajat keterbukaan rekrutmen akan ditentukan oleh derajat pelaksanaan demokrasi dalam sebuah negara. Adapun beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik yang dikembangkan oleh (Geddes,1996:78-79), mengklasifikasikan rekrutmen menjadi 4 model, yaitu :

- a. *Partisanship* yakni rekrutmen kader yang dinilai atas loyalitasnya pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan dan kurang memperhatikan kompetensi.
- b. *Meritocratic* ialah rekrutmen politik dari kalangan yang memiliki kompetensi tinggi seperti pengusaha, teknokrat, guru dan pekerja ahli.
- c. *Compartmentalization* adalah rekrutmen politik yang didasarkan pada pengangkatan meritokrasi informal bagi posisi-posisi yang dipertimbangkan penting bagi keberhasilan pragmatis sambil pada saat yang sama memungkinkan untuk menggunakan pengangkatan-pengangkatan lain untuk dukungan jangka pendek dan pengembangan pengikut loyal.
- d. *Survival* ialah proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.

3. Mekanisme Rekrutmen Pada Partai Golkar

Menentukan Daftar Calon Anggota Legislatif dilakukan penilaian terhadap kader bakal calon anggota Legislatif meliputi aspek: (a) Pengabdian, (b) elektabilitas, (c) penugasan sebagai fungsionaris dan, (d) pendidikan.

- a. **Aspek Pengabdian**
Aspek Pengabdian adalah rekam jejak seorang kader dalam partai Golkar yang meliputi partisipasi seorang kader di saat menjabat sebagai pengurus partai, anggota fraksi, pengurus organisasi sayap, pengurus badan dan lembaga, pengurus Ormas yang didirikan maupun yang mendirikan.

- b. Aspek Elektabilitas
Aspek Elektabilitas adalah peluang keterpilihan seorang kader pada suatu daerah pemilihan dilihat dari sisi basis dukungan massa. Hal ini dinilai pada Aspek ini adalah; hasil survei Elektabilitas terbaru di daerah pemilihan;
- c. Aspek Penugasan Fungsiaris; (laporan kegiatan penugasan)
Penugasan Fungsiaris, adalah suatu bentuk penugasan yang diberikan kepada setiap Fungsiaris partai setelah kader yang bersangkutan mengikuti orientasi fungsiaris. Penugasan fungsiaris dimaksudkan agar tiap-tiap fungsiaris partai Golkar memberikan kontribusi aktif dalam konsolidasi partai (vertikal dan horizontal) memaksimalkan pelaksanaan kaderisasi partai, serta mendorong pelaksanaan program karya-kekaryaan di daerah penugasan masing-masing.
- d. Aspek Pendidikan
Aspek Pendidikan adalah pengalaman pendidikan seorang kader meliputi pendidikan formal, non formal dan pendidikan kepartaian.

D. Penerapan Nilai Integritas dalam Rekrutmen Politik

Umumnya kata integritas lebih banyak dikaitkan dengan kepemimpinan—entah dalam bidang apapun: dalam dunia bisnis, lingkup pemerintahan, lingkup organisasi, atau kemasyarakatan. Itu tidak berarti bahwa yang dituntut memiliki integritas itu hanyalah mereka yang berada di posisi kepemimpinan. Semua orang, khususny orang-orang dewasa, teristimewa yang berpendidikan diharapkan memiliki integritas.

Jika orang berbicara mengenai integritas, pastilah pikiran yang muncul adalah seputar hal-hal yang serba positif, hal-hal yang terpuji. Jadi kata integritas memiliki konotasi etis yang sangat kental. Semua sikap dan perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etis langsung dipandang sebagai yang bertentangan dengan integritas. Orang yang memiliki integritas adalah orang

yang dianggap baik, panutan, yang dapat dipercaya, orang yang setia, jujur, jauh dari kepalsuan dan kepura-puraan, menjadi teladan dalam banyak hal.

Paine (1994) mengatakan Integritas merupakan sebuah standar moralitas dan etika seseorang, tidak ada hubungannya dengan situasi yang kebetulan ada di sekitar Anda dan tidak mendorong kecepatan. Konsep integritas itu sendiri di dalamnya mengidentikkan dengan kata hati, akuntabilitas moral, komitmen moral, dan konsistensi moral seseorang. Integritas sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan manusia.

Menurut Agus Suryo Sulaiman (2010:131) bahwa Integritas adalah keseluruhan nilai-nilai kejujuran, keseimbangan, memberi kembali, dedikasi, kredibilitas dan berbagai hal pengabdian diri pada nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup. Menurut Sumartono (2004:16) Integritas adalah Integritas adalah bersikap jujur, konsisten, komitmen, berani, dan dapat dipercaya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa integritas merupakan sikap, perilaku dan perbuatan seseorang yang dilandasi oleh nilai-nilai untuk jujur, konsisten, komitmen, berani, dapat dipercaya sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga terciptanya hal-hal yang serba positif dan hal-hal yang terpuji.

Sedangkan rekrutmen politik politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan

sebaik-baiknya. Guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan secara tertutup.

Berikut proses rekrutmen politik dibagi menjadi dua pola (Syamsudin dalam Tangkilisan, 2003: 189) yaitu:

- a. Rekrutmen terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan baik jabatan politik maupun administrasi atau pemerintahan.
- b. Rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga negara, artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun pemerintah. Dalam sistem yang tertutup ini orang yang mendapatkan posisi elite melalui cara-cara yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai integritas dalam rekrutmen politik ialah rekrutmen yang melalui proses yang terbuka dan menanamkan nilai integritas di dalam proses rekrutmen nya. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:

1. Mekanismenya demokratis
2. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki
3. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi
4. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

Dengan proses rekrutmen yang terbuka serta menanamkan nilai integritas di dalamnya yang terdiri dari nilai integritas seperti :

1. Jujur
2. Konsisten
3. Komitmen
4. Berani
5. Dapat dipercaya sesuai dengan kenyataan yang ada.

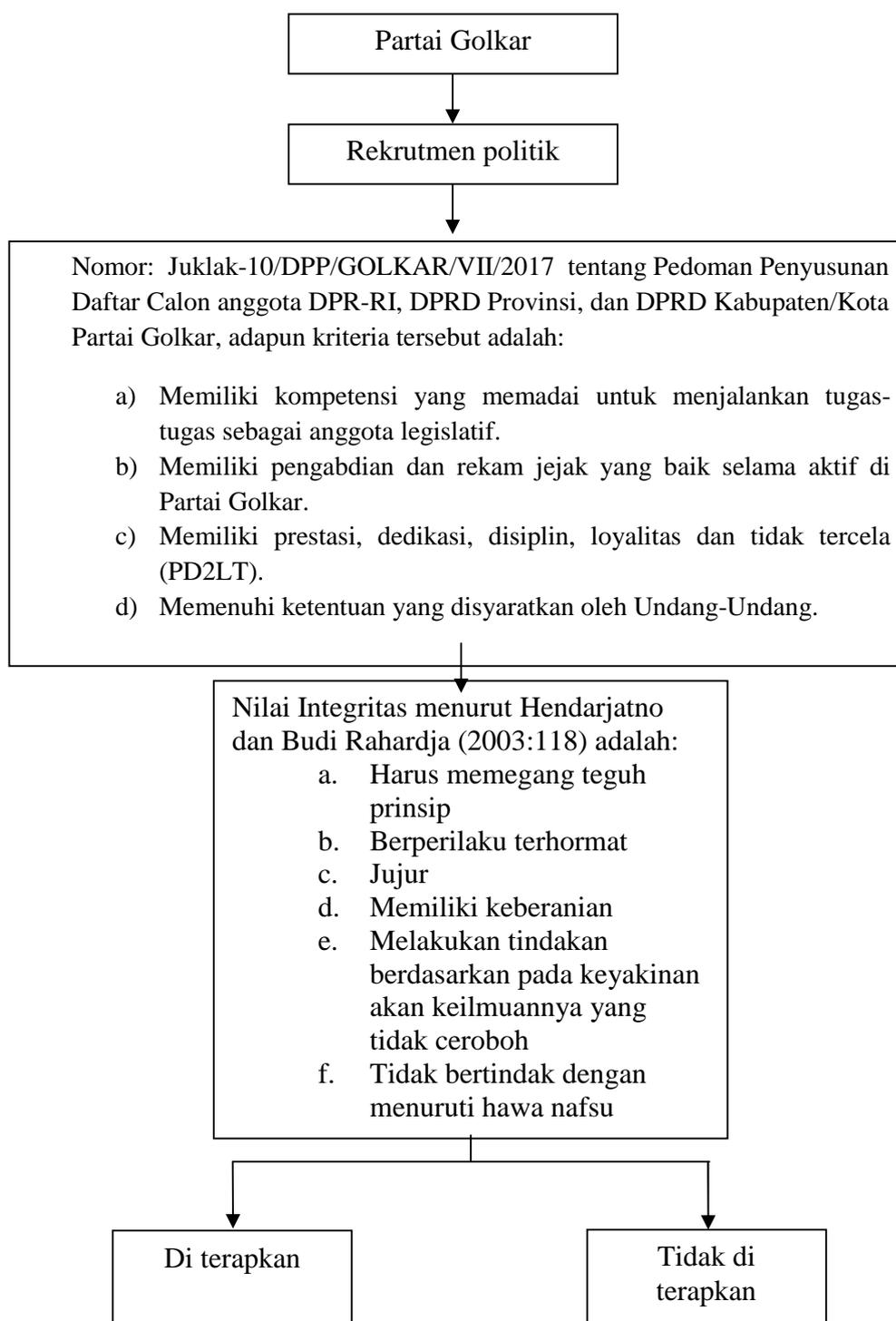
E. Kerangka Pikir Penelitian

Dari berbagai teori yang telah dikemukakan di atas, peneliti akan lebih cenderung melihat penerapan nilai integritas dalam pola rekrutmen sebagai bagian proses politik dimana partai politik saling bertarung untuk memperoleh eksistensi dalam system politik dengan menempatkan calon-calon yang diusung maju pada pemilu 2019. Untuk memperoleh eksistensi dalam sistem politik, partai politik harus memperoleh suara yang bersaing dalam pemilihan umum. Pada proses menyiapkan calon-calon yang di usung oleh partai politik, biasanya terdapat pola yang berbeda yang dilakukan oleh setiap partai termasuk Partai Golkar.

Proses rekrutmen yang baik akan menghasilkan kader yang baik pula. Untuk mengetahui baik atau tidak proses rekrutmen dalam partai politik dapat dilihat dari beberapa indikator yang bersangkutan dengan sifat rekrutmen tersebut seperti syarat dan prosedur yang dilakukan oleh partai politik, dan juga bertujuan agar kualitas serta integritas calon legislatifnya sesuai dengan yang dicita-citakan oleh masyarakat serta agar masyarakat tidak salah pilih.

Adapun kriteria yang terdiri Partai Golkar adalah seperti memiliki kompetensi yang memadai sama dengan jujur dalam indikator integritas. Sedangkan PDLT, pengabdian dan rekam jejak yang baik merupakan sama dengan indikator berperilaku terhormat. Namun untuk menghasilkan kader yang berintegritas seharusnya partai menerapkan nilai-nilai integritas dalam rekrutmennya menurut Hendarjatno dan Budi Rahardja (2003:118) bisa dilihat dari 6 indikator yaitu, harus memegang teguh prinsip, berperilaku terhormat, jujur, memiliki keberanian, melakukan tindakan berdasarkan pada keyakinan akan keilmuannya yang tidak ceroboh, tidak bertindak dengan menuruti hawa nafsu. Jika salah satu nilai-nilai tersebut tidak diterapkan maka bisa dikatakan keseluruhan proses rekrutmen Partai Golkar tidak berintegritas.

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Diolah peneliti 2017

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara terperinci. Metode deskriptif adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya. Oleh karena itu pada tahap ini metode deskriptif tidak lebih daripada penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya. Nawawi (2012 : 63) Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki itu.

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini lebih menekankan pada pemusatan pemerhatian pada masalah ataupun situasi yang aktual untuk menggambarkan dan mengetahui proses atau kejadian yang sedang berlangsung sebagai bagian dari fenomena sosial. Pemusatan perhatian dari situasi ataupun masalah aktual yang diteliti pada penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan nilai integritas dalam rekrutmen politik Partai Golkar Bandar Lampung 2019.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian dilakukan dengan memilih fokus atau pokok permasalahan yang dipilih untuk diteliti, dan bagaimana memfokuskannya, masalah mula-mula sangat umum, kemudian mendapatkan fokus yang ditujukan kepada hal-hal yang spesifik. Namun, fokus itu masih dapat berubah.

Fokus sangat penting sebab tidak ada penelitian tanpa fokus, sedangkan sifat fokus tergantung dari jenis penelitian yang dilaksanakan. Penentuan tahap-tahap penelitian, dan bagaimana beranjaknya dari tahap satu ke tahap yang lain dalam proses yang berbentuk siklus. Ikbar (2012:185-186) Tahapan-tahapan tersebut memiliki tiga fase pokok : pertama, tahap orientasi dengan mendapatkan informasi tentang apa yang penting untuk ditemukan, atau orientasi dan peninjauan. Kedua, tahap eksplorasi dengan menemukan sesuatu secara eksplorasi terfokus, dan ketiga, tahap *member check* dengan mengecek temuan menurut prosedur yang tepat dan memperoleh laporan akhir.

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Penulis memfokuskan penelitian pada penerapan nilai integritas dalam rekrutmen anggota Partai Golongan Karya (Golkar).

Dalam fokus penelitian yang ingin diteliti, peneliti bertujuan untuk menjawab penerapan nilai integritas dalam rekrutmen politik yang dilakukan Partai Golkar Kota Bandar Lampung dalam menetapkan calon legislatifnya untuk menghadapi pemilu 2019-2024. Berangkat dari tujuan tersebut penulis memfokuskan batasan-batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun beberapa pilihan nilai dalam integritas yang dikembangkan oleh Hendarjatno dan Budi Rahardja (2003:118) elemen-elemen integritas adalah:

- a. Harus memegang teguh prinsip
- b. Berperilaku terhormat
- c. Jujur
- d. Memiliki keberanian
- e. Melakukan tindakan berdasarkan pada keyakinan akan keilmuannya yang tidak ceroboh
- f. Tidak bertindak dengan menuruti hawa nafsu

C. Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling*. Alasan peneliti menggunakan penentuan informan secara *purposive sampling* karena peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih adalah sebagai aktor dan kelompok sasaran yang terlibat. Sehingga menurut peneliti teknik *purposive sampling* sangat tepat untuk melakukan pengambilan kriteria sampel yang benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan, sehingga pengumpulan

data yang langsung pada sumber datanya dapat dilakukan secara proporsional demi keakuratan penelitian Sugiyono (2007: 90). Informan menurut Prastowo (2010:147) adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Menurut Sugiyono (2014:216) penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang dinamakan sebagai narasumber, atau partisipan atau informan, dan guru dalam penelitian. Pertimbangan dan kriteria tertentu untuk informan dijelaskan sebagai berikut:

1. Informan merupakan subyek telah lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang berkaitan dengan perekrutan calon legislatif.
2. Informan merupakan subyek yang masih aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran perhatian peneliti.
3. Informan merupakan subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu.

Adapun informan yang telah penulis tentukan adalah sebagai berikut:

Tabel .4 Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Yuhadi, S. Hi	Ketua DPD II Golkar Kota Bandar Lampung
2.	H. Agoes Soeleman, S.H., M.M.	Wakil Sekertaris Bid. Kepengurusan, Keanggotaan dan Kaderisasi
3.	H. Benny Mansyur, S.Sos., S.H.	Wakil Badan Pemenangan Pemilu
4.	Ali Wardana, S.IP.	Calon legislative 2019 dari Partai Golkar
5.	Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si	Akademisi dan Pengamat Politik FISIP, Universitas Lampung
6.	Fadly Ramdan, S. Ikom	Ketua Aliansi Jurnalis Independen Provinsi Lampung
7.	Ahmad Sibli	Mantan Kader/Pengurus DPD II Golkar Kota Bandar Lampung

Sumber: Diolah oleh peneliti 2018

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Lofland dalam Moleong, (2005:157) Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian.

Secara umum data penelitian dibagi kepada 2 (dua) jenis, yakni:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Data primer diperoleh dari informan diantara pengurus DPD II Partai Golkar, akademisi, jurnalis, dan mantan kader/pengurus Partai Golkar. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti yaitu penerapan nilai integritas dalam rekrutmen anggota Partai Golkar.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku, jurnal, laporan dan lain lain. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku buku, artikel dan lain- lain yang berkaitan dengan proses rekrutmen calon legislatif. Data sekunder berupa, tentang petunjuk pelaksana dan petunjuk Teknis mekanisme penjarangan calon anggota legislatif, serta SK DPD II Partai Golongan Karya Kota Bandar Lampung tentang Skoring Penilaian calon anggota legislatif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa sumber data yang digunakan dan sekaligus sebagai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau responden. Purhantara (2010 :80-81) Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai (*interviewee*).

Wawancara yang dilakukan secara terbuka serta mendalam agar dapat memberikan kesempatan narasumber tersebut dalam rangka menjawab secara bebas. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan dari sumber-sumber data tersebut yang belum dapat dipahami oleh peneliti serta untuk memperoleh pengertian serta penjelasan secara mendalam tentang realita objek yang diteliti. Proses wawancara ini dilakukan dengan panduan wawancara sebagai alat bantu penulis dalam penyajian data.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi sebagai salah satu instrumen yang penting dalam mendukung penelitian ini. Hal tersebut disebabkan oleh masalah yang diteliti mengenai penerapan nilai integritas dalam rekrutmen politik oleh sebuah Partai Golkar akan diatur berdasarkan JUKLAK-10 dan peraturan organisasi partai, selain itu juga terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang tata cara pengajuan bakal calon legislatif oleh partai politik dengan mencantumkan syarat.

Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen elektronik, gambar ataupun tertulis. Oleh karena itu, yang penulis lakukan dalam mencari informasi mengenai rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh Partai Golongan Karya berupa dokumen yang berisi tentang petunjuk pelaksana, teknis proses rekrutmen dan lain- lain, khususnya kaitannya dengan penerapan nilai-nilai integritas di dalam rekrutmen.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut (Efendi dalam Singarimbun, dkk 1995: 240) terdiri dari:

1. *Editing*, adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan terhadap fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan
2. *Interpretasi data*, pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban dari informan dengan hasil yang lain, serta dari dokumentasi yang ada.. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, maka teknik analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan di lapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi lainnya, secara umum analisis data mencakup 3 hal, sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Moleong (2013 : 288) Reduksi data diidentifikasi adanya bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Peneliti mengumpulkan data mengenai proses rekrutmen politik calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung di Partai Golkar. Peneliti mewawancarai informan yaitu Ketua DPD II Partai Golkar, Wakil Bidang Kaderisasi, Wakil Bidang Pemenangan Pemilu, Akademisi, Jurnalis dan Mantan Kader Partai Golkar menggunakan pertanyaan yang berbeda antara internal partai dengan eksternal partai. Untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti membuang jawaban yang tidak sesuai dengan focus penelitian.

2. Penyajian Data

Sugiyono (2009 : 247) Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk menggambarkan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Catatan-catatan penting dilapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif unntuk mempermudah pembaca memahami secara

praktis. Kegiatan lanjutan peneliti dalam penyajian data ialah data yang didapat disajikan dalam bentuk table dengan tujuan menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Sugiyono (2009 : 250) Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses penyajian data. Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian.

H. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data ini menggunakan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi data. Sugiyono (2009 : 274) Triangulasi data dibagi ke dalam 3 jenis yaitu triangulasi data sumber, triangulasi data teknik dan triangulasi data waktu. Bungin (2003 : 205) Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan akan dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Partai Golkar

Sejarah Partai Golkar bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golkar (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang semakin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati lewat Musyawarah Kerjan Nasional (Mukernas) I, Bulan Desember 1965.

Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (Kino), yaitu:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro)
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
4. Organisasi Profesi
5. Ormas Pertahanan Keamanan (Hankam)
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (Gakari)
7. Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971

Ke- 7 (tujuh) Kino yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golkar . Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu kontestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar kepada grassroot level. Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang.

Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar. Hasilnya di luar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional.

NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR. Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar.

Golkar menyatakan diri bukan partai politik karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya. September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi Golkar pun

mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI), kemudian juga kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya Golkar dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru.

Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar Golkar sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi.

Pemuka ketiga jalur tersebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Jadi Pimpinan Pemilu Dalam pemilu Golkar yang berlambang beringin ini selalu tampil sebagai pemegang. Kemenangan Golkar selalu diukir dalam pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Arus reformasi bergulir

Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca di mana-mana. Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga mengusung citra sebagai Golkar baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra, inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar yang cukup legendaris.

Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi bersama partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di Era Reformasi ini Partai Golkar mengalami penurunan suara di peringkat ke dua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun pada pemilu berikutnya Golkar kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah. (sumber: kpu.go.id diakses pada 23 April 2018)

Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai Golkar kembali turun ke posisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam Munas VIII di Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikan Jusuf Kalla. Sebagai pimpinan baru partai beringin, Aburizal bertekad akan kembali membawa Golkar memenangkan pemilu.

Dia menargetkan Golkar menjadi pemenang pertama pemilu legislatif 2014 nanti. Ketua Umum Golkar dari masa ke masa :

1. Djuhartono (1964-1969)
2. Suprpto Sukowati (1969–1973)
3. Amir Moertono (1973–1983)
4. Sudharmono (1983–1988)
5. Wahono (1988–1993)
6. Harmoko (1993–1998)
7. Akbar Tandjung (1998–2004)
8. Jusuf Kalla (2004–2009)
9. Aburizal Bakrie (2009-)
10. Setya Novanto
11. Airlangga Hartarto

B. Visi Partai Golkar

Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri negara (*the founding fathers*) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai Golkar sebagai pengemban cita-cita Proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya.

Partai Golkar berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri,

terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi.

Dengan visi ini maka Partai Golkar hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistim kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai Golkar upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

C. Misi Partai Golkar

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai Golkar dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan idiologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai Golkar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu:

Pertama, mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.

Kedua, melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (*merit system*) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat

D. Tujuan dan Fungsi Partai Golkar

Partai Golkar bertujuan :

- a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD 1945;
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945;
- c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum, dan Hak Asasi Manusia.

Partai Golkar menyelenggarakan fungsi:

- a. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- c. Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- d. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan integritas, jejak rekam dan kesetaraan.

E. Keanggotaan dan Sistem Kaderisasi Partai

a. Keanggotaan

1. Anggota Partai Golkar adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota.
2. Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan Partai Golkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

b. Sistem Kaderisasi

Kader partai terdiri dari:

1. Kader Partai Golkar adalah Anggota Partai Golkar yang merupakan tenaga inti dan penggerak partai;
2. Kader Partai adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan

Kader dan disaring atas dasar kriteria:

1. Mental-Ideologi;
2. Penghayatan terhadap Visi, Misi, dan Platform Partai;
3. Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT);
4. Kepemimpinan;
5. Militansi dan mandiri;

c. Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader Partai

berdasarkan prestasi yang luar biasa; Ketentuan lebih lanjut tentang Kader diatur dalam Peraturan Organisasi.

F. Struktur Organisasi, Wewenang dan Kewajiban

Struktur Organisasi Partai Golkar terdiri atas tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, yang masing-masing berturut-turut dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif yang memiliki wewenang :

1. Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional/ Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan Rapat Pimpinan Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar.
2. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar mengesahkan komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
3. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi
4. Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Dewan Pimpinan Pusat selain memiliki wewenang juga memiliki kewajiban, kewajiban Dewan Pimpinan Pusat adalah:

1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar.
2. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional.

b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi yang memiliki wewenang:

1. Menentukan kebijakan tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar.
2. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Provinsi. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Berkewajiban:

1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah
2. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah Provinsi.

d. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang:

1. Menentukan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar.
2. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota.
3. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Kecamatan.

4. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Kecamatan.

Sedangkan kewajiban dari Dewan Pimpinan Daerah

Kabupaten/Kota adalah :

1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar.
2. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota.

G. Ukuran Rekrutmen Yang Berintegritas

1. Menurut Partai Golkar

Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP-227/DPP/Golkar/I/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar, adapun kriteria tersebut adalah:

- a) Memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota legislatif.
- b) Memiliki pengabdian dan rekam jejak yang baik selama aktif di Partai Golkar.
- c) Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT).
- d) Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.

2. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi

- a. Panduan rekrutmen politik yang berbasis kaderisasi dengan metode yang inklusif, baku, akuntabel dan demokratis.
- b. Regulasi internal tentang rekrutmen calon pejabat politik dan publik (calon anggota legislatif, calon pasangan kepala daerah, calon presiden dan wakil presiden, serta pejabat publik) melibatkan anggota (kader) dan pengurus partai.
- c. Implementasi sistem rekrutmen yang berbasis kaderisasi dengan inklusif, baku, akuntabel dan demokratis.
- d. Dibangunnya sistem monitoring dan evaluasi.

3. Menurut Teori Hendarjatna dan Budi Rahardja (2003)

Untuk mengukur penerapan nilai integritas dalam rekrutmen caleg bisa dilihat dari 6 indikator yaitu:

- a. Harus memegang teguh prinsip
- b. Berperilaku terhormat
- c. Jujur
- d. Memiliki keberanian
- e. Melakukan tindakan berdasarkan pada keyakinan akan keilmuannya yang tidak ceroboh
- f. Tidak bertindak dengan menuruti hawa nafsu.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Dalam melaksanakan rekrutmen caleg untuk DPRD Kota Bandar Lampung DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung tidak menerapkan nilai-nilai integritas dalam proses rekrutmen nya. Penerapan nilai integritas dalam rekrutmen Partai Golkar DPD II Kota Bandar Lampung dalam rekrutmen caleg nya tidak menerapkan dari nilai atau elemen-elemen integritas yang sebagai berikut:

1. Partai Golkar untuk mendapat caleg yang berkualitas dan berintegritas dengan menggunakan rekrutmen secara terbuka namun dalam implementasinya hal tersebut hanyalah bersifat normatif. Bisa dikatakan penerapannya belum dilaksanakan.

2. Partai Golkar mengatakan ketika calon yang telah terkena kasus hukum merupakan telah melanggar Tindak Tidak Tercela. Namun tidak adanya keselarasan antara internal partai bahwa kasus sepele masih bias dipertimbangkan Sehingga peneliti simpulkan bahwa Partai Golkar tidak menerapkan nilai integritas berperilaku terhormat.
3. Partai Golkar memiliki tim khusus untuk menjaring dan mencari kebenaran laporan-laporan yang telah dikumpulkan para caleg sehingga para caleg akan terjaring ketat jika ada pemalsuan ijazah dan LHKPN. Dalam nilai integritas ini Partai Golkar telah menerapkannya dengan baik dan sesuai aturan pada Juklak nya.
4. Partai Golkar menegaskan bahwa tidak adanya mahar politik. Partai Golkar selalu menjunjung tinggi Juklak 10 untuk sebagai syarat utama menjadi caleg.
5. Partai Golkar menerapkan sikap pragmatis karena partai butuh suara yang banyak. Hal tersebut memiliki kesimpulan bahwa Partai Golkar belum menerapkan nilai tidak ceroboh dalam proses rekrutmennya karena Partai Golkar masih melakukan sikap pragmatis untuk mencalonkan calegnya.

6. Partai Golkar melakukan beberapa tindakan seperti melakukan pembinaan terhadap kadernya, melakukan pemantauan sikap kader di masyarakat serta memiliki rekam jejak para calegnya sehingga Partai Golkar lebih mudah untuk memantau sikap-sikap yang dapat menghancurkan citra partai.

B. Saran

Peneliti memandang bahwa apa yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung belum baik. Akan tetapi untuk memperbaiki proses rekrutmen Caleg, peneliti menyarankan agar dalam proses rekrutmen Caleg ini ada baiknya jika DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung menerapkan nilai integritas agar calon yang tersaring berintegritas. Serta mengikuti aturan dari KPK bagaimana proses rekrutmen yang berintegritas dan memasukan serangkaian tes psikologi dan tes rohani yang peneliti anggap sangat penting untuk memberikan analisis tentang keadaan psikologi seorang Caleg. Analisis ini penting untuk meminimalisir lolosnya kader-kader yang memiliki kepribadian kurang baik terpilih sebagai anggota legislatif yang nantinya justru akan berdampak buruk bagi citra partai dan juga elektabilitas partai dalam Pemilu.

Hal lain yang kami anggap penting sebagai bahan pertimbangan bagi DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung adalah perlunya informasi yang jelas kepada Bacaleg mengenai mekanisme atau hal-hal apa yang menjadi bahan

pertimbangan dalam penentuan Caleg. Hal ini menjadi penting terlebih setelah kami melakukan *interview* dengan Caleg yang berasal dari luar partai Golkar dimana mereka tidak mengetahui mekanisme penentuan Caleg ini dan akhirnya justru akan menimbulkan perasaan ketidakpuasan dari Caleg tersebut.

Perlunya keterbukaan terhadap proses seleksi Bacaleg maupun dimedia konvensional ataupun non konvensional sehingga dapat dinilai bahwa Partai Golkar adalah partai yang terbuka. Dan hasil dari perekrutannya pun harus jelas dan jauh dari kata pragmatis agar masyarakat tahu rekam jejak dari Caleg tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Golongan Karya (Golkar) Tahun 2015-2019.
- Arifin, Anwar. 2014. *Politik Pencitraan Pencitraan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budiardjo, Miriam, 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta.PT Gramedia Pustaka Utama
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Cloud, Henry, 2007, *Integritas: Keberanian Memenuhi Tuntutan Kenyataan*. Terjemahan oleh Hendry Tanaja. Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama.
- Efriza. 2012. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Jakarta: Alfabeta.
- Firmanzah Ph. D. 2007. *Marketing Politik – Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: YayasanObor Indonesia
- Firmanzah Ph. D. 2008. *Mengelola PartaiPolitik – Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firmanzah. 2011. *Mengelola PartaiPolitik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Yayasan PustakaObor Indonesia: Jakarta.
- Geddes, Barbara. 1996. *Politician's Dilema : Building State Capacity in Latin Amerika*. Amerika. University California Press,
- Hamid, Ahmad. F. 2008. *Partai Politik Lokal di Aceh – Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta: Kemirtaan.
- Hany, Wurangian. 2005. *Integritas dan Obyektivitas auditor pada KAP serta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Majalah Ekonomi (TH XV, NO 3A Desember) Universitas Airlangga, Surabaya.

- Hendarjatno dan Budi Rahardja. 2003. *Persepsi Masyarakat Perbankan terhadap Integritas, Objektivitas, dan Independensi Akuntan Publik*. Majalah Ekonomi (Th XXI No. 2A Agustus). Universitas Airlangga.
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: SinarBaruAlgensindo, Cetakan kesembilan.
- Litbang Kompas. 2004. *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Buku Kompas.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta. PT Gramedia.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Paine. 1994. *Managing for Organizational Integrity*.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Institute for Democracy and Welfarism: Yogyakarta.
- Rush, Michael & Phillip, Althoff. 2000. *Pengantar Sosiologi Politik*. (diterjemahkan dari judul aslinya *Introduction to Political Sociology* oleh Kartini Kartono). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ketujuh.
- Schroder, Peter. *Strategi Politik*. Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Indonesia.
- Sulaiman, Suryo. 2010. *The Quantum Success*. Jakarta: PT Elex Media.
- Suprihatini, Amin. 2008. *Partai Politik di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.

Skripsi:

Dhesthoni.2014. *Pola Rekrutmen Politik DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung Dalam Penetapan Calon Legislatif Periode 2014-2019*. Universitas Lampung: Bandar Lampung

Fernanda, Putra. 2012. *Proses Rekrutmen Calon Legislatif Loka di Medan Pada 2009. (studikamus Partai Keadilan Sejahtera)*. FISIP. Medan

Rahmi, Sitti. 2016. *Strategi Komunikasi Politik Dalam Sistem Rekrutmen Kader Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Wilayah Sulawesi Tenggara*. Fisip UHO: Sulawesi Tenggara

Jurnal :

Parji. 2011. *Pengembangan Nilai-Nilai Integritas Dan Identitas Nasional Dari Perspektif Pendidikan*. Madiun : Jurnal Integritas. v o l . 0 1 N o . 2 J u l i 2 0 1 1

Antonius Atosökhi Gea. 2014. *Integritas Personal Dan Kepemimpinan Etis*. Jurnal Integritas Personal. Vol.5 No.2 Oktober 2014: 950-959.

Roni Tamara Saputra. 2014. *Sistem Kaderisasi Dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2009 (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 2, (1), 2014 : 1829-1841.

Teguh Adi Prasajo. 2013. *Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dari Partai Golkar Untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019*. Jurnal Politika. Vol. 4, No. 2, Oktober 2013.

Internet:

<http://www.kompasiana.com/>

<https://www.kpk.go.id/splash/>

<http://medeka.com/>

Sumber Lain:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik